

Kinerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menyalurkan Aspirasi Rakyat pada Era Demokrasi Digital

Fitra Hadi Khaz*, Alya Lestari, Ananda Putri Ramadani, Dinda Febryani, Indah Lestari

Sekolah Tinggi Administrasi Lancang Kuning Dumai

Abstrak: Transformasi digital mengubah cara warga negara mengakses informasi, berkomunikasi, berorganisasi, serta menyalurkan aspirasi politik. Dalam demokrasi digital, aspirasi tidak lagi hanya disampaikan melalui musyawarah dan mekanisme formal, tetapi juga melalui komentar, tagar, pesan langsung, dan kanal pengaduan daring yang real time dan terdokumentasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kinerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menyalurkan aspirasi rakyat pada era demokrasi digital di Kota Dumai, serta mengidentifikasi mekanisme penghimpunan dan tindak lanjut aspirasi beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Mulyono, SE selaku Ketua DPC PKB Kota Dumai, dan dilengkapi data persepsi melalui kuesioner daring (19 responden). Analisis dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran aspirasi PKB bersifat hibrida: kanal luring melalui jejaring komunitas, kegiatan sosial budaya, dan koordinasi dengan DPRD; kanal daring melalui komunikasi di media sosial dan instrumen survei online. Fokus aspirasi yang menonjol berkaitan dengan kebutuhan dasar, terutama ketahanan dan ketersediaan pangan, serta penguatan harmoni masyarakat multietnik melalui pengedepanan adat. Faktor pendukung mencakup legitimasi sosial, rutinitas koordinasi organisasi, dan peluang perluasan jangkauan komunikasi digital. Faktor penghambat utama adalah kemiskinan dan keterbatasan literasi, termasuk literasi digital dan keamanan ruang digital, yang memengaruhi kualitas partisipasi dan keberlanjutan umpan balik. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola aspirasi berbasis SOP, mekanisme feedback yang terukur, dan perlindungan data pada kanal digital. Temuan ini menegaskan bahwa visibilitas digital harus diiringi sistem manajemen aspirasi, agar interaksi daring berujung pada advokasi kebijakan nyata di tingkat daerah.

Kata Kunci: Demokrasi Digital, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Penyaluran Aspirasi, Media Sosial, Kota Dumai

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.391>

*Correspondence: Fitra Hadi Khaz

Email: fitrahadihaz@gmail.com

Received: 22-01-2026

Accepted: 22-02-2026

Published: 22-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Digital transformation has reshaped how citizens access information and voice political aspirations through the internet, social media, and digital public-service platforms. In a digital democracy, grievances, needs, policy proposals, and evaluations circulate rapidly, publicly, and in a traceable form, increasing expectations of responsiveness and accountability. This study describes the performance of the National Awakening Party (PKB) in channeling public aspirations in Dumai City and maps the mechanisms, enabling conditions, and constraints within a digitally mediated ecosystem. The research adopts a descriptive qualitative case-study design. Primary data were collected through an in-depth interview with Mulyono, SE, Chair of the Dumai PKB branch (DPC), and complemented by an online questionnaire capturing 19 responses. Data were analyzed thematically through data reduction, display, and conclusion drawing. Findings indicate that PKB's aspiration management in Dumai is hybrid: offline channels rely on community networks, socio-cultural activities, and legislative coordination, while online channels leverage social-media communication and web-based survey instruments. The most salient aspiration agenda concerns basic needs, particularly food security and affordable staples distribution, alongside efforts to maintain multicultural cohesion by foregrounding local customary norms. Supporting factors include social legitimacy, routine organizational coordination with representatives, and the broader reach provided by digital communication. Major obstacles are poverty and limited literacy especially digital literacy and online safety which affect participation quality and the continuity of feedback. The study recommends strengthening aspiration governance through clear SOPs, measurable feedback loops, and robust data protection across digital channels. These improvements can help translate online engagement into substantive representation and policy advocacy outcomes.

Keywords: digital democracy, National Awakening Party (PKB), aspiration channeling; social media, Dumai City

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah cara warga negara mengakses informasi, berkomunikasi, berorganisasi, serta menyalurkan aspirasi politik. Dalam konteks demokrasi, perubahan ini memunculkan konfigurasi baru relasi negara masyarakat, termasuk pergeseran pola representasi dari yang sebelumnya bertumpu pada pertemuan tatap muka, musyawarah lokal, dan mekanisme kelembagaan formal, menuju pola yang semakin “terhubung” melalui internet, media sosial, dan platform layanan publik berbasis digital. Pergeseran ini penting karena aspirasi rakyat yang mencakup keluhan, kebutuhan, usulan kebijakan, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah tidak lagi disampaikan hanya melalui forum konvensional, melainkan menyebar dan beredar cepat dalam ruang digital yang terbuka, real time, dan terdokumentasi. Dalam literatur e-democracy, ruang digital dipahami sebagai arena yang berpotensi memperluas partisipasi, mempercepat arus informasi, serta membuka peluang deliberasi publik yang lebih luas, meskipun kualitasnya sangat bergantung pada desain platform, literasi digital, dan tata kelola aktor-aktor politik yang terlibat (Susanto & Poernomo, 2025)

Di Indonesia, peningkatan penggunaan media digital juga berkorelasi dengan munculnya bentuk partisipasi politik yang lebih beragam. Salah satu temuan berbasis data survei menunjukkan bahwa konsumsi informasi melalui email dan internet berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, baik yang konvensional maupun non konvensional, dengan pengaruh pada partisipasi non konvensional cenderung lebih kuat. Temuan seperti ini mengindikasikan bahwa kanal digital tidak hanya menjadi “media informasi”, tetapi juga memantik tindakan politik seperti opini publik, petisi daring, kampanye isu, hingga bentuk kontrol sosial terhadap aktor politik. Dengan kata lain, dalam era demokrasi digital, saluran aspirasi rakyat menjadi lebih cair: ia dapat muncul melalui kolom komentar, tagar, pengaduan aplikasi, hingga konten video politik yang viral (Vinanda et al, 2025).

Perubahan ekosistem partisipasi ini terjadi bersamaan dengan agenda nasional penguatan infrastruktur dan tata kelola digital. Dalam laporan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2021, isu strategis yang menonjol mencakup pembangunan infrastruktur digital, tata kelola pemerintahan digital, pengendalian konten digital, pengembangan SDM/literasi digital, hingga keamanan ruang digital. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang ruang digital bukan sekadar sektor teknis, melainkan bagian dari tata kelola demokrasi modern: ketersediaan jaringan, literasi, keamanan, dan kualitas informasi publik menjadi prasyarat agar partisipasi digital dapat berfungsi sehat (Elizamiharti & Nelfira, 2023).

Dalam konteks tersebut, partai politik memiliki posisi yang semakin penting sekaligus semakin diuji. Secara normatif, partai dipahami sebagai “penghubung” antara masyarakat dan negara; partai menyerap aspirasi, mengagregasi kepentingan,

memperjuangkannya melalui lembaga perwakilan, serta memastikan warga memperoleh representasi dalam proses kebijakan. Perspektif ini tercermin dalam kajian mengenai PKB yang menegaskan bahwa partai politik menempati posisi strategis sebagai aspirator masyarakat dengan negara, sehingga peran dan kinerjanya menjadi krusial dalam kehidupan demokrasi. Namun, era demokrasi digital mengubah medan kerja partai. Di satu sisi, digitalisasi memberi kesempatan bagi partai untuk mendengar suara publik lebih cepat dan luas. Di sisi lain, tuntutan responsivitas meningkat karena publik kini menilai kinerja partai bukan hanya dari hasil elektoral atau pernyataan elite, tetapi juga dari seberapa cepat partai merespons isu viral, seberapa terbuka kanal pengaduan, dan seberapa nyata advokasi kebijakan yang lahir dari suara konstituen. Dengan demikian, “kinerja partai dalam menyalurkan aspirasi” perlu dipahami tidak hanya sebagai kapasitas komunikasi, tetapi juga sebagai kapasitas organisasi: bagaimana aspirasi dikumpulkan, diverifikasi, diprioritaskan, diperjuangkan, hingga diberi umpan balik (feedback) kepada masyarakat (Khairil et al, 2024).

Studi-studi mengenai demokrasi digital menekankan bahwa e-democracy secara ideal menguatkan transparansi, partisipasi, dan deliberasi, tetapi hasilnya tidak otomatis positif. Banyak praktik e-democracy berakhir menjadi sekadar kanal informasi satu arah, atau sekadar “etalase program”, jika tidak disertai mekanisme tindak lanjut yang terukur. Karena itu, pengukuran kinerja aktor politik dalam demokrasi digital perlu menempatkan indikator yang jelas: keterbukaan informasi (apa yang disediakan), kemudahan akses kanal aspirasi (bagaimana publik masuk), kualitas interaksi (apakah deliberatif/dua arah), serta dampak (apakah ada output kebijakan/advokasi).

Pada level praktik di Indonesia, platform layanan publik digital menunjukkan bagaimana kanal aspirasi dapat terinstitusionalisasi. Kajian mengenai pemanfaatan platform “Jakarta Kini (JAKI)” menegaskan bahwa fitur pengaduan dan layanan terintegrasi memungkinkan warga melaporkan masalah publik, memantau tindak lanjut, dan memberi evaluasi, sehingga berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam kerangka demokrasi digital. Dukungan data dalam kajian tersebut juga menampilkan antusiasme pelaporan warga serta rasio penyelesaian yang tinggi, yang memberi gambaran bahwa kanal aspirasi digital dapat efektif jika didesain dengan mekanisme respons pemerintahan yang jelas.

Jika pemerintah daerah dapat membangun kanal aspirasi digital yang terukur, maka partai politik pun menghadapi ekspektasi serupa: partai diharapkan makin “hadir” melalui kanal digital dan tidak hanya menunggu siklus pemilu. Di sinilah kinerja Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi relevan untuk dikaji. PKB merupakan salah satu partai yang memiliki basis sosial yang kuat dan sejarah ideologis yang khas, serta beroperasi dalam lanskap informasi yang semakin digital. Kajian tentang PKB menunjukkan akar pembentukannya sebagai aspirasi warga nahdliyyin serta karakter partai yang menonjolkan

nilai kebangsaan dan keterbukaan dalam masyarakat multikultural (Misbachuddin et al, 2025)

Di tingkat organisasi lokal, studi mengenai komunikasi politik DPC PKB Kabupaten Kudus menggambarkan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat tidak terjadi secara abstrak, melainkan melalui pola komunikasi, jejaring kader, serta mekanisme penampungan yang terhubung dengan kebutuhan konstituen. Studi ini penting karena memberikan rujukan empiris bagaimana struktur partai di daerah menjalankan fungsi komunikasi politik dan penyerapan aspirasi yang pada era digital kini dapat diperluas melalui kanal daring (Firdaus et al, 2021)

Di sisi lain, digitalisasi juga mengubah strategi partai dalam membangun kedekatan politik. Penelitian tentang penggunaan TikTok sebagai sarana pemasaran politik PKB menunjukkan kecenderungan partai memanfaatkan platform video pendek untuk membangun visibilitas, memperluas jangkauan pesan, dan membentuk persepsi publik melalui konten yang sesuai logika algoritma serta budaya digital audiens. Strategi semacam ini dapat berdampak pada proses aspirasi: ketika komunikasi politik bergeser ke ruang konten, maka interaksi warga komentar, duet, share, tagar berpotensi menjadi “data aspirasi” baru yang perlu dikelola (Vinanda et al, 2025)

Selain pemasaran politik, fenomena personalisasi juga kian kuat. Kajian tentang personal branding kader PKB menekankan bahwa pencitraan personal dapat menjadi instrumen untuk menarik simpati, membangun kepercayaan, dan memperkuat kedekatan dengan publik. Namun, personal branding juga memunculkan tantangan evaluasi kinerja: apakah kedekatan digital yang terbentuk benar-benar diterjemahkan menjadi penyaluran aspirasi yang substantif, atau hanya menjadi popularitas. Pertanyaan ini menegaskan perlunya studi yang menilai jembatan antara “komunikasi digital” dan “output representasi” (Farhan, 2018)

Lebih jauh, kinerja penyaluran aspirasi juga berkaitan dengan agenda dan isu yang diperjuangkan partai. Salah satu contoh ialah komitmen PKB yang mendeklarasikan diri sebagai “partai hijau” dan upaya memperjuangkan isu lingkungan melalui program dan kebijakan. Kajian mengenai komitmen tersebut menunjukkan bahwa deklarasi politik perlu diikuti program kerja nyata, pengawalan kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat yang pada prinsipnya merupakan bentuk penyaluran aspirasi berbasis isu (issue-based representation). Dalam lanskap digital, isu lingkungan juga sering menjadi topik viral, sehingga kanal digital dapat memperkuat maupun menguji konsistensi advokasi partai (Boestam et al, 2023)

Tantangan lain dalam demokrasi digital adalah kualitas ruang publik digital itu sendiri. Penguatan keamanan ruang digital dan pengendalian konten menjadi agenda strategis pemerintah, menandakan bahwa ruang digital rawan distorsi: misinformasi, ujaran kebencian, manipulasi opini, dan polarisasi. Bagi partai politik, risiko ini berdampak

langsung pada proses aspirasi. Aspirasi rakyat bisa bercampur dengan disinformasi; kritik bisa berubah menjadi serangan personal; dan dialog bisa tergantikan oleh mobilisasi emosional. Dalam kondisi seperti ini, kinerja partai tidak cukup diukur dari seberapa sering merespons, tetapi juga bagaimana menjaga kualitas komunikasi dan akuntabilitas informasi.

Menurut (Fathor rahman, 2025) Dimensi akuntabilitas publik juga tampak pada pengawasan pemilu yang makin partisipatif dan memanfaatkan teknologi. Panduan Bawaslu tentang pusat pengawasan partisipatif menggambarkan pemanfaatan portal berbasis teknologi informasi (misalnya Gowaslu) serta pengelolaan media sosial untuk mendorong pelibatan warga dalam pengawasan pemilu. Ini menunjukkan dua hal: (1) institusi demokrasi di Indonesia memang bergerak ke arah pemanfaatan teknologi untuk memperluas partisipasi; dan (2) warga kian terbiasa menyampaikan laporan/aspirasi melalui kanal digital. Konsekuensinya, partai sebagai pilar demokrasi dan aktor representasi semakin dituntut menata mekanisme penyaluran aspirasi yang transparan dan terukur dalam medium yang sama

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang kinerja PKB dalam menyalurkan aspirasi rakyat pada era demokrasi digital menjadi penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, demokrasi digital memperluas kanal aspirasi dan mempercepat ekspektasi respons, sehingga fungsi representasi partai mengalami redefinisi operasional (bagaimana bekerja sehari-hari). Kedua, PKB sebagai partai dengan basis sosial kuat dan pengalaman politik panjang menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat legitimasi melalui penyaluran aspirasi yang efektif (Ambarwati & Assiddiq, 2021), terutama ketika strategi komunikasi digital (TikTok, personal branding) berkembang pesat. Ketiga, gap riset masih terlihat: banyak kajian membahas komunikasi politik lokal, pemasaran politik digital, atau platform aspirasi pemerintah, tetapi belum cukup mengintegrasikan semuanya ke dalam kerangka evaluasi kinerja penyaluran aspirasi partai yang sistematis dari input aspirasi hingga output advokasi dan feedback.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana PKB menangkap, mengolah, dan menindaklanjuti aspirasi publik melalui kanal luring dan kanal digital. Desain ini relevan karena fokus penelitian berada pada proses, makna, dan praktik kelembagaan dalam konteks tertentu (Vandito et al, 2023) Rujukan empiris yang sejalan menunjukkan penggunaan kualitatif-deskriptif dalam mengkaji penyaluran aspirasi oleh struktur PKB tingkat daerah melalui observasi dan wawancara Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan DPC/DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Dumai dengan fokus kajian pada kinerja PKB dalam menyalurkan aspirasi rakyat pada era demokrasi digital. Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu berupaya memahami secara mendalam proses, mekanisme, serta dinamika penyaluran aspirasi melalui kanal digital maupun non-digital berdasarkan pengalaman aktor kunci di tingkat organisasi partai. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara sebagai instrumen penggalian informasi secara langsung dari informan. Informan utama dalam penelitian ini adalah Mulyono, SE selaku Ketua DPC PKB Kota Dumai.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menilai kinerja PKB dalam menyalurkan aspirasi rakyat pada era demokrasi digital, analisis ini menggunakan teori kinerja sektor publik menurut Dwiyanto sebagaimana dijelaskan oleh Halim (2023) yang menilai kinerja melalui lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

1. Produktivitas

Menurut Dwiyanto (2017) Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga aktivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara output dengan Input.

Pada indikator produktivitas, PKB Dumai menunjukkan kemampuan menghasilkan berbagai output politik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama melalui program kios pangan kebangsaan, dukungan terhadap kegiatan adat, serta intensitas koordinasi dengan DPRD. Output ini menunjukkan bahwa partai mampu mengubah masukan aspirasi menjadi aktivitas dan kebijakan yang konkret, sejalan dengan konsep produktivitas dalam teori Dwiyanto yang menekankan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.

Berdasarkan wawancara Ketua DPC PKB Kota Dumai, kinerja penyaluran aspirasi dipahami melalui orientasi program yang menyentuh kebutuhan dasar khususnya ketahanan dan ketersediaan pangan. Informan menuturkan bahwa PKB Dumai mengupayakan “kesejahteraan pangan” dan menaunkannya dengan gagasan kemandirian pangan, serta menyebut keberlanjutan kebijakan pemerintah pusat melalui pembentukan “kios pangan kebangsaan” sebagai mitra distribusi bahan pokok agar tersedia dan terjangkau. Deskripsi informan memperlihatkan “kinerja” yang ditampilkan melalui ukuran yang sangat pragmatis: bahan pokok tersedia, harga terjangkau, dan distribusi menjangkau masyarakat luas. Bahkan informan menekankan konteks administratif Dumai (memiliki 7 kecamatan dan 36 kelurahan) dan menyatakan keinginan agar tiap kelurahan memiliki kios pangan tersebut (Rois, 2024).

2. Kualitas Layanan

Menurut Dwiyanto (2017 :50) kualitas layanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam mengukur kinerja organisasi publik. kualitas layanan tercermin dari kemampuan PKB memberikan pelayanan aspirasi melalui dua kanal yaitu kanal luring berbasis jejaring sosial adat dan kanal digital melalui media sosial serta survei online. Kualitas layanan meningkat ketika PKB menyediakan ruang aspirasi yang lebih mudah diakses, cepat, dan komunikatif, meskipun sebagian masyarakat masih menghadapi hambatan literasi digital.

Dalam literatur politik, partai berfungsi sebagai “sektor perantara” yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah melalui fungsi komunikasi politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi aspirasi. Dalam konteks PKB di tingkat daerah, hubungan ini tampak kuat pada studi tentang DPC PKB Kabupaten Kudus, yang menjelaskan bahwa komunikasi politik DPC bertujuan menyalurkan aspirasi dan agregasi masyarakat, dan pelaksanaannya dilakukan melalui jalur formal kelembagaan partai dan fraksi PKB di DPRD serta jalur informal melalui personal dan pertemuan.

Namun, pada era demokrasi digital, fungsi perantara itu mengalami perluasan dan tekanan sekaligus. Di satu sisi, kanal digital membuka peluang untuk mempercepat “penghimpunan aspirasi” dan memperluas jangkauan; di sisi lain, kanal digital memunculkan tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi karena proses komunikasi bersifat lebih terbuka dan berlangsung hampir tanpa jeda. Demokrasi digital, menurut Berg dan Hofmann, tidak dapat dibaca secara linear sebagai “kemunduran” atau “pembaruan” demokrasi, tetapi sebagai re-intermediasi yang mengubah institusi dan praktik lama melalui infrastruktur digital (Nofiard, 2022).

3. Responsivitas

Menurut Dwiyanto (2017 :51) responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

PKB menunjukkan kepekaan terhadap isu yang paling dominan di masyarakat Dumai, yaitu isu ketahanan pangan serta kebutuhan masyarakat akan harmoni sosial pada lingkungan multietnik. PKB merespons aspirasi tersebut dengan program, dukungan kegiatan seni budaya, dan kehadiran aktif di ruang digital untuk menangkap suara publik secara real time.

Dari sudut pandang penyaluran aspirasi, orientasi semacam ini menunjukkan bahwa aspirasi rakyat (terutama di tingkat lokal) sering berpusat pada isu ekonomi sehari-hari. Kinerja partai dalam konteks ini dapat dibaca sebagai kesesuaian antara “peta masalah warga” dan “program yang diadvokasi partai.” Di era demokrasi digital, orientasi

programatik seperti ini menjadi penting karena ruang publik digital cenderung mempercepat isu-isu yang paling dekat dengan pengalaman warga. Ketika harga bahan pokok naik atau akses distribusi terganggu, isu tersebut cepat menyebar melalui platform digital, dan partai yang responsif biasanya berusaha menunjukkan tindakan (program, advokasi, kemitraan) dalam kerangka pemecahan masalah. Dengan kata lain, kinerja penyaluran aspirasi dalam demokrasi digital bukan hanya “menerima keluhan,” tetapi menunjukkan proses konversi keluhan menjadi agenda tindakan yang nyata dan terukur meskipun bentuk tindakan tersebut tidak selalu berupa kebijakan formal, melainkan bisa berupa program kemitraan yang menguatkan akses kebutuhan pokok (Ramadhani et al, 2025).

Selain isu ekonomi, wawancara juga menegaskan dimensi sosial-budaya sebagai arena penyaluran aspirasi. Informan menggambarkan Dumai sebagai wilayah masyarakat yang heterogen (disebut terdapat sekitar 18 suku yang hidup berdampingan), dan dalam konteks itu PKB Dumai menekankan pengedepanan adat, serta menyebut lembaga adat sebagai pembina bagi partai. Dalam logika penyaluran aspirasi, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak selalu berbentuk permintaan anggaran atau fasilitas fisik; aspirasi juga dapat berupa tuntutan pengakuan identitas, harmoni antarkelompok, dan keberlanjutan nilai budaya. Pada titik ini, kinerja partai dapat dilihat melalui kemampuan menjaga “ruang representasi” untuk kelompok-kelompok sosial yang beragam.

Literatur personal branding kader PKB juga relevan untuk mendudukan isu inklusivitas. Studi Susanto dan Poernomo menggambarkan bagaimana PKB membangun citra sebagai partai terbuka/inklusif, misalnya melalui praktik simbolik-ritual yang menampilkan keberagaman, dan mendorong kader untuk aktif di media sosial (Susanto & Poernomo, 2025). Jika citra inklusif selaras dengan praktik di lapangan (sebagaimana PKB Dumai menekankan peran adat dan keragaman suku), maka peluang warga menyampaikan aspirasi juga akan meningkat karena warga merasakan keamanan sosial dan pengakuan.

Dalam demokrasi digital, aspek inklusivitas semakin penting karena ruang digital sering memproduksi polarisasi dan serangan identitas. Ketika partai mampu menunjukkan narasi yang menenangkan dan mengikat pemilih lintas identitas, partai berpotensi menjadi saluran aspirasi yang lebih “diterima” oleh banyak kelompok. Dengan demikian, kinerja PKB dalam menyalurkan aspirasi pada ranah sosial-budaya dapat dibaca melalui konsistensi antara (1) pengakuan terhadap struktur lokal (adat), (2) peran partai dalam memfasilitasi kegiatan budaya, dan (3) penguatan narasi inklusif dalam ruang digital.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

PKB Dumai menjalankan penyaluran aspirasi sesuai prosedur kelembagaan melalui fraksi DPRD, rapat rutin, serta penghormatan terhadap norma sosial dan adat. Hal ini menggambarkan kesesuaian tindakan partai dengan nilai, aturan, dan prosedur yang berlaku, seperti ditekankan oleh Dwiyanto bahwa responsibilitas merupakan kepatuhan terhadap standar normatif dalam pelayanan publik.

Ukuran kinerja penyaluran aspirasi juga tampak dari bagaimana partai melakukan koordinasi internal dengan representasi formalnya (anggota dewan). Dalam wawancara, informan menjelaskan bahwa rapat resmi dengan DPRD tingkat kota dilakukan minimal satu kali dalam sebulan, di samping konsultasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa penyaluran aspirasi tidak hanya ditentukan oleh “seberapa banyak aspirasi masuk,” tetapi juga oleh “seberapa kuat mesin koordinasi” untuk memproses dan memperjuangkan aspirasi itu. Studi DPC PKB Kudus memberi konteks yang searah: jalur formal partai dan fraksi di DPRD merupakan kanal utama penyaluran aspirasi, tetapi dihadapkan pada hambatan komunikasi dengan masyarakat, antarfraksi, dan dengan eksekutif (Firdaus et al, 2021).

Dengan demikian, frekuensi rapat dan konsultasi di PKB Dumai dapat dibaca sebagai salah satu upaya mengurangi hambatan koordinasi. Meski frekuensi rapat tidak otomatis menjamin penyelesaian aspirasi, ia menjadi indikator adanya rutinitas organisasi untuk menjaga alur proses. Selain itu, informan menyebut bahwa peran PKB Dumai dalam pembangunan daerah lebih ditekankan pada pembangunan karakter dan peradaban dari segi SDM, karena pembangunan struktur fisik dianggap lebih menjadi kewenangan kepala daerah. Pembacaan ini menghadirkan elemen penting: penyaluran aspirasi bukan semata memproduksi proyek fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas manusia (pendidikan, literasi, keterampilan). Dalam demokrasi digital, orientasi pembangunan SDM memiliki resonansi langsung karena kualitas partisipasi digital ditentukan oleh literasi dan kecakapan warga. Berkaitan dengan itu, data literasi digital nasional menunjukkan bahwa literasi digital Indonesia berada pada kategori “sedang” dengan angka 3,49, dan aspek keamanan digital termasuk yang rendah dibanding pilar lain (Kementerian Kominfo, 2021; Katadata, 2021). Artinya, kinerja partai yang menekankan pembangunan SDM dapat diletakkan sebagai respon struktural terhadap hambatan terbesar demokrasi digital: partisipasi digital tidak optimal bila literasi rendah dan kerentanan keamanan tinggi (Dewi & Sholahuddin, 2020).

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Adapun indikator akuntabilitas terlihat dari keterbukaan PKB dalam menjelaskan program, hambatan struktural masyarakat (kemiskinan dan literasi digital rendah), serta keterlibatan anggota dewan yang dapat dipantau masyarakat melalui media sosial. Meskipun demikian, akuntabilitas digital masih perlu diperkuat melalui sistem pelaporan tindak lanjut aspirasi dan mekanisme feedback yang lebih transparan. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja PKB Dumai selaras dengan kelima indikator kinerja Dwiyanto, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pelaporan digital dan tata kelola mekanisme aspirasi berbasis teknologi (Tengah & Layanan, 2020).

Artinya, kinerja partai yang menekankan pembangunan SDM dapat diletakkan sebagai respon struktural terhadap hambatan terbesar demokrasi digital: partisipasi digital tidak optimal bila literasi rendah dan kerentanan keamanan tinggi. Salah satu pernyataan paling tegas dari Ketua DPC PKB Dumai adalah identifikasi tantangan penyaluran aspirasi: "musuh terbesar" yang dihadapi adalah kebodohan dan kemiskinan. Secara deskriptif, ini menempatkan penyaluran aspirasi sebagai proses yang terhambat oleh faktor struktural: keterbatasan pendidikan dan keterbatasan ekonomi. Dalam kerangka demokrasi digital, dua faktor ini juga berhubungan kuat dengan kualitas partisipasi digital: kemiskinan berkaitan dengan akses perangkat dan internet; kebodohan (dalam makna keterbatasan literasi) berkaitan dengan kemampuan membedakan informasi benar dan palsu, memahami prosedur kebijakan, dan menyusun tuntutan yang efektif. Karena itu, kinerja PKB dalam menyalurkan aspirasi pada era demokrasi digital perlu dibaca secara realistis: partai bisa membangun kanal digital dan membuat konten interaktif (Aminulloh et al, 2025), tetapi bila problem dasar masyarakat adalah pendidikan dan ekonomi, maka kanal digital hanya menjadi salah satu bagian dari strategi yang lebih luas. Inilah mengapa kinerja partai di era digital sering kali tetap memerlukan basis kerja sosial dan programatik, bukan hanya kerja komunikasi platform (Nuwa et al, 2025).

Mekanisme yang digunakan PKB untuk menghimpun, memproses, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui kanal digital maupun non-digital

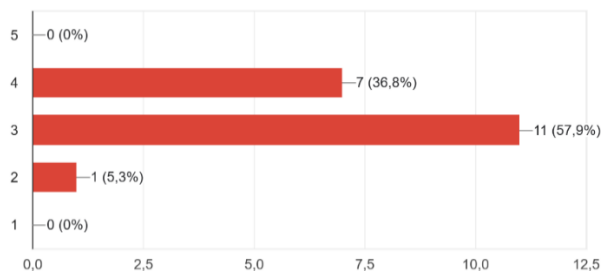
Mekanisme penghimpunan aspirasi non-digital dalam praktik partai politik di Indonesia umumnya terjadi melalui reses, forum warga, posko, kunjungan lapangan, serta pertemuan informal. Temuan studi DPC PKB Kudus memperlihatkan bahwa penyerapan aspirasi dilakukan melalui kegiatan wajib seperti reses anggota dewan dan sosialisasi, serta diperkuat pola informal berupa kerja-kerja taktis dan strategis melalui personal dan pertemuan. (Suryani & Azmy, 2023) Pada PKB Dumai, meskipun wawancara tidak

menyebut “reses” secara eksplisit, informan menjelaskan adanya praktik konsultasi dan rapat resmi minimal sekali sebulan dengan DPRD tingkat kota. Praktik rapat-konsultasi semacam ini biasanya menjadi wadah internal untuk menyaring dan memformulasikan aspirasi yang telah dihimpun dari masyarakat. Di samping itu, informan menggambarkan penggiatan kegiatan-kegiatan di kelurahan dan dukungan terhadap kesenian daerah, termasuk pemberian dukungan dana oleh anggota dewan provinsi atau DPRD tingkat kota untuk mensupport kesenian daerah.

Secara deskriptif, aktivitas ini dapat berfungsi ganda: (1) sebagai bentuk respon terhadap aspirasi pelestarian budaya, dan (2) sebagai ruang sosial yang memudahkan proses “aspirasi masuk” karena warga berinteraksi langsung dengan jejaring partai. Selain itu, penguatan peran lembaga adat sebagai pembina (sebagaimana disebut informan) menunjukkan adanya mekanisme penghimpunan aspirasi melalui struktur sosial lokal (Misbachuddin et al, 2025).

Dalam masyarakat multietnik, lembaga adat sering menjadi simpul legitimasi; sehingga ketika partai menempatkannya sebagai mitra, partai memperoleh kanal komunikasi yang lebih diterima. Dengan demikian, mekanisme non-digital PKB (berdasarkan kombinasi literatur dan wawancara Dumai) dapat dipetakan sebagai: **(a) jejaring sosial lokal** (kegiatan budaya, pertemuan), **(b) koordinasi formal dengan wakil rakyat** (rapat DPRD), dan **(c) penguatan legitimasi sosial** melalui kedekatan dengan lembaga adat/komunitas.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media digital mendapatkan perhatian dari partai.
19 jawaban

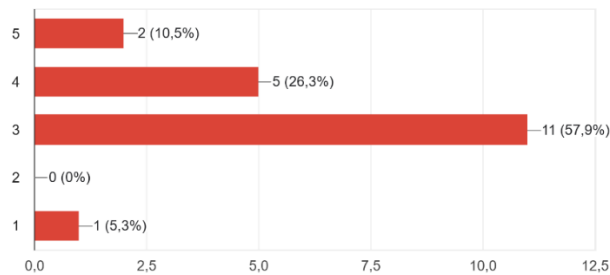


Gambar 1. Partai politik menggunakan sarana media sebagai penghimpun aspirasi

Mekanisme penghimpunan aspirasi digital dalam demokrasi digital umumnya berlangsung melalui interaksi di media sosial, pesan langsung (DM), komentar, siaran langsung (live), dan kanal survei/formulir online. Dalam kasus PKB, studi mengenai penggunaan TikTok menjelaskan bagaimana media baru dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran politik yang dapat meningkatkan partisipasi politik generasi muda, dengan

menekankan interaksi, daya tarik konten, dan keterpaparan publik terhadap pesan politik (Rois, 2024). Secara deskriptif, penggunaan TikTok menunjukkan bahwa PKB tidak hanya hadir di ruang digital sebagai papan pengumuman, tetapi berupaya memanfaatkan konfigurasi platform (video pendek, tren, narasi) untuk menimbulkan kedekatan emosional dan membangun engagement. Engagement inilah yang pada tahap tertentu membuka ruang aspirasi, karena publik lebih cenderung menyampaikan komentar dan fenomena sosial ketika merasa “dekat” dan “didengar.” Namun, penting dicatat bahwa penghimpunan aspirasi digital juga menimbulkan tantangan: volume masukan yang besar dapat menciptakan “kebisingan,” sehingga partai membutuhkan mekanisme pemrosesan yang jelas. Dalam penelitian ini, keberadaan kuesioner online juga dapat dibaca sebagai mekanisme penghimpunan aspirasi digital. Dokumen kuesioner menunjukkan tautan Google Forms dan mencatat terdapat 19 jawaban.

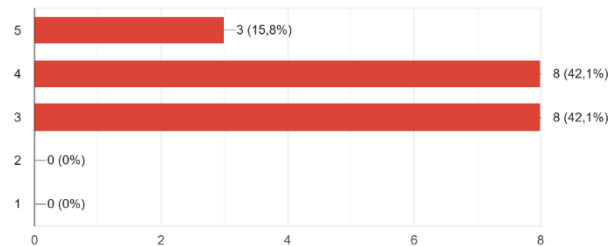
Partai politik rutin mengunggah informasi kegiatan dan kebijakan di media digital.
19 jawaban



Gambar 2. Partai politik menggunakan sarana media

Meskipun isi jawaban tidak tersedia pada berkas salinan yang diunggah, penggunaan Google Forms menandakan upaya memanfaatkan kanal digital untuk menangkap data/pendapat dari responden dengan cara yang lebih cepat dan terdokumentasi. Di luar instrumen survei, mekanisme digital juga terkait dengan citra dan personal branding kader. Susanto dan Poernomo menekankan bahwa keterlibatan kader di media sosial menjadi bagian dari strategi membangun citra partai terbuka dan inklusif, dan ketidaksesuaian citra dapat memunculkan krisis kepercayaan (Fitriyah et al, 2025). Dalam konteks aspirasi, bila publik percaya pada integritas dan konsistensi identitas komunikator (kader/partai), publik akan lebih berani menyampaikan aspirasi, termasuk aspirasi yang sensitif.

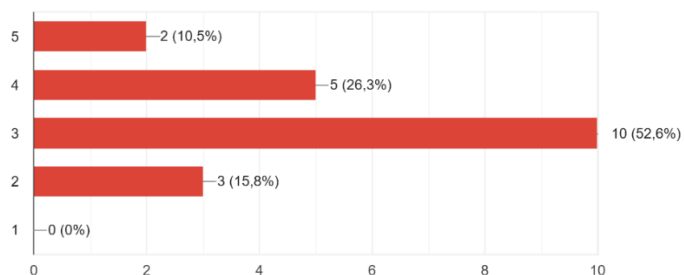
Media sosial partai politik digunakan untuk menyampaikan pendapat dan sikap terhadap isu nasional.
19 jawaban



Gambar 3. Partai politik menggunakan sarana media sebagai menyikapi isu nasional

Tahap paling menentukan dalam penyaluran aspirasi adalah pemrosesan. Demokrasi digital sering membuat penghimpunan aspirasi menjadi lebih mudah, tetapi pemrosesan menjadi lebih sulit karena masukan datang dari banyak kanal, beragam format, dan kadang bersifat emosional. Pada level organisasi, pemrosesan aspirasi favorit terjadi melalui: (a) klasifikasi isu (ekonomi, pendidikan, budaya), (b) verifikasi kebutuhan, (c) pemetaan kewenangan (daerah/provinsi/pusat), dan (d) prioritasasi (mana yang paling urgent dan feasible). Studi DPC PKB Kudus menegaskan arah pemrosesan: aspirasi dan agregasi masyarakat diproses menjadi kebijakan publik melalui jalur formal kelembagaan partai dan fraksi di DPRD (Firdaus et al, 2021).

Informasi yang disampaikan partai politik di media digital mudah dipahami oleh masyarakat
19 jawaban

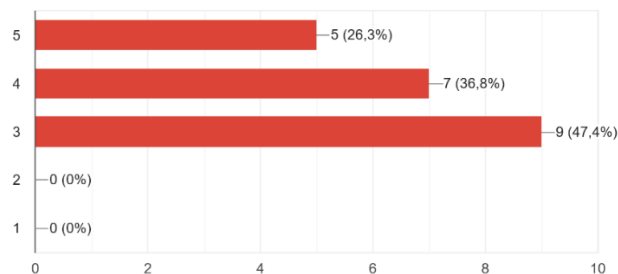


Gambar 4. Partai politik menggunakan sarana media sehingga mudah dipahami

Hal ini berarti pemrosesan bukan hanya berhenti di rapat internal, tetapi dihubungkan dengan instrumen representasi formal. Dalam konteks Dumai, proses ini tercermin dari rutinitas rapat resmi minimal bulanan dengan DPRD serta konsultasi berkelanjutan. Secara deskriptif, ritme pertemuan ini dapat berfungsi sebagai “mesin agregasi,” yaitu mengumpulkan masukan dan memetakan arah perjuangan aspirasi melalui jalur legislatif.

Pada ranah ekonomi, pemrosesan aspirasi oleh PKB Dumai tampak terarah pada satu isu besar: pangan. Informan mengikatnya dengan cita-cita kemandirian pangan dan implementasi kios pangan kebangsaan sebagai mitra distribusi bahan pokok berharga terjangkau. Ini menunjukkan model pemrosesan yang bertumpu pada program payung: banyak aspirasi ekonomi warga (harga, ketersediaan, akses) “ditarik” ke satu kerangka solusi programatik. Secara organisasi, model program payung semacam ini dapat memudahkan prioritasasi, karena partai tidak menanggapi aspirasi secara tercerai-berai, melainkan mengintegrasikannya ke program yang dapat dipahami public (Firdaus et al, 2021) (Vandito et al, 2023).

Partai politik menggunakan media digital untuk menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat.
19 jawaban



Gambar 5. Partai politik menggunakan sarana media menjadi komunikasi dua arah

Di ranah sosial-budaya, pemrosesan aspirasi tampak melalui strategi “mengutamakan adat” dan dukungan terhadap kegiatan kesenian daerah. Dalam masyarakat multietnik, pengolahan aspirasi sosial budaya memerlukan kehati-hatian agar tidak menciptakan eksklusivitas karena itu, pbingungan partai sebagai payung yang mengedepankan adat dapat berfungsi sebagai mekanisme mempertemukan aspirasi lintas identitas.

Faktor-faktor mendukung dan menghambat kinerja PKB dalam penyaluran aspirasi rakyat pada ekosistem demokrasi digital.

Pertama, faktor pendukung penting adalah struktur representasi formal melalui DPRD. Studi DPC PKB Kudus menekankan bahwa jalur formal partai dan fraksi DPRD menjadi kanal utama penyaluran aspirasi, sehingga aspirasi memiliki ruang untuk diproses menjadi kebijakan publik (Firdaus et al, 2021).

Dalam data Dumai, dukungan struktur ini terlihat dari adanya ritme koordinasi: rapat resmi minimal sebulan sekali dengan DPRD tingkat kota dan konsultasi Frekuensi ini mendukung kinerja karena menjaga alur pemrosesan aspirasi tidak putus. Kedua, faktor programatik yang jelas juga mendukung kinerja. PKB Dumai menonjolkan program ekonomi yang berorientasi pada ketersediaan pangan melalui kios pangan kebangsaan dan target pemerataan hingga kelurahan.

Kedua, faktor programatik yang jelas juga mendukung kinerja. PKB Dumai menonjolkan program ekonomi yang berorientasi pada ketersediaan pangan melalui kios pangan kebangsaan dan target pemerataan hingga kelurahan. Program payung semacam ini memudahkan konsolidasi aspirasi: aspirasi ekonomi harian dapat diikat menjadi agenda bersama, sehingga partai lebih mudah menjelaskan kepada publik “apa yang sedang diperjuangkan.” Ketiga, faktor legitimasi sosial melalui pengedepanan adat dan pengakuan keragaman. Informan menyebut Dumai dihuni sekitar 18 suku dan PKB Dumai mengedepankan adat dengan lembaga adat sebagai Pembina (Nuwa et al, 2025).

Ketiga, faktor legitimasi sosial melalui pengedepanan adat dan pengakuan keragaman. Informan menyebut Dumai dihuni sekitar 18 suku dan PKB Dumai mengedepankan adat dengan lembaga adat sebagai Faktor ini mendukung karena aspirasi tidak hanya urusan kebijakan, tetapi juga urusan rasa aman sosial. Dalam masyarakat yang majemuk, partai yang mampu merawat harmoni sosial cenderung lebih dipercaya, dan kepercayaan meningkatkan kemauan warga menyampaikan aspirasi. Keempat, peluang kanal digital sebagai penguat partisipasi, terutama generasi muda. Studi tentang TikTok sebagai sarana pemasaran politik PKB menjelaskan bahwa media baru dapat meningkatkan

partisipasi politik Gen Z, menekankan daya tarik konten dan keterlibatan audiens sebagai modal komunikasi (Rois, 2024).

Keempat, peluang kanal digital sebagai penguat partisipasi, terutama generasi muda. Studi tentang TikTok sebagai sarana pemasaran politik PKB menjelaskan bahwa media baru dapat meningkatkan partisipasi politik Gen Z, menekankan daya tarik konten dan keterlibatan audiens sebagai modal komunikasi (Rois, 2024). Untuk konteks penyaluran aspirasi, ini berarti kanal digital dapat memperluas input aspirasi dari kelompok yang sebelumnya jarang datang ke forum fisik.

Kelima, faktor citra inklusif dan personal branding kader. Dalam ruang digital, tokoh/kader sering menjadi “pintu” aspirasi; publik mengirim pesan bukan kepada “organisasi abstrak”, tetapi kepada akun yang dianggap representatif. Studi Susanto dan Poernomo menunjukkan pentingnya personal branding kader dan konsistensi citra partai terbuka/inklusif dalam menjaga kepercayaan publik (Susanto & Poernomo, 2025). Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang memperlancar arus aspirasi. Hambatan utama yang paling eksplisit dalam data Dumai adalah hambatan struktural sosial: “kebodohan dan kemiskinan” disebut sebagai musuh terbesar. Dalam penyaluran aspirasi, kemiskinan membatasi partisipasi (akses transport, waktu, perangkat digital), sedangkan keterbatasan literasi membatasi kemampuan warga merumuskan aspirasi dan mengawal proses kebijakan.

Dalam (Ihsan et al, 2023) Hambatan ini bertemu dengan realitas literasi digital Indonesia yang masih kategori “sedang” dan memiliki kelemahan pada keamanan digital. Data LAKIP Kominfo 2021 dan laporan Status Literasi Digital 2021 sama-sama menegaskan skor indeks 3,49, serta pilar keamanan digital relatif rendah (Kementerian Kominfo, 2021; Katadata, 2021). Hambatan ini bertemu dengan realitas literasi digital Indonesia yang masih kategori “sedang” dan memiliki kelemahan pada keamanan digital. Data LAKIP Kominfo 2021 dan laporan Status Literasi Digital 2021 sama-sama menegaskan skor indeks 3,49, serta pilar Dalam situasi demikian, kanal digital dapat memunculkan masalah baru: warga rentan termakan hoaks, takut menyampaikan aspirasi karena risiko perundungan online, atau bingung membedakan kanal resmi dan kanal palsu. Dampaknya, aspirasi yang masuk

bisa tidak berkualitas (noise tinggi) atau partisipasi menjadi semu (banyak komentar, sedikit pengawalan).

Hambatan lain yang umum terjadi pada penyaluran aspirasi partai adalah dinamika koordinasi politik, terutama hubungan antarfraksi dan dengan eksekutif. Studi DPC PKB Kudus menjelaskan adanya hambatan komunikasi dengan masyarakat, antarfraksi di DPRD, serta komunikasi dengan pihak eksekutif (Firdaus et al, 2021). Dalam demokrasi digital, hambatan koordinasi ini terasa lebih “menyakitkan” karena ekspektasi publik meningkat: warga ingin tindak lanjut cepat, sementara proses kebijakan berjalan lambat dan penuh negosiasi. Ketika proses lambat, publik mudah menilai partai tidak bekerja, sekalipun problemnya berasal dari struktur pemerintahan dan tata kelola anggaran. Selanjutnya, ada hambatan yang khas demokrasi digital: arsitektur platform yang mendorong viralitas dan polarisasi. Berg dan Hofmann menekankan bahwa demokrasi digital membentuk ulang perantaraan dan organisasi, sehingga institusi harus menyesuaikan diri dengan cara baru keterlibatan digital (Berg & Hofmann, 2021).

Selanjutnya, ada hambatan yang khas demokrasi digital: arsitektur platform yang mendorong viralitas dan polarisasi. Berg dan Hofmann menekankan bahwa demokrasi digital membentuk ulang perantaraan dan organisasi, sehingga institusi harus menyesuaikan diri dengan cara baru keterlibatan digital (Berg & Hofmann, 2021). Dalam praktik penyaluran aspirasi, ini berarti partai harus menghadapi aspirasi yang muncul tidak selalu rasional atau terstruktur, melainkan cepat, emosional, dan kadang terfragmentasi. Akibatnya, partai memerlukan kapasitas pemrosesan dan komunikasi krisis yang lebih matang. Terakhir, kanal digital memunculkan hambatan etika dan perlindungan privasi. Ketika aspirasi dihimpun melalui DM, komentar, atau formulir, partai bersentuhan dengan data personal (nama, nomor, keluhan sensitif). Pedoman AoIR tentang etika riset internet menekankan bahwa etika internet research perlu memperhatikan konteks, ekspektasi privasi, informed consent, serta mitigasi risiko bagi subjek (Franzke et al, 2020).

Terakhir, kanal digital memunculkan hambatan etika dan perlindungan privasi. Ketika aspirasi dihimpun melalui DM, komentar, atau formulir, partai bersentuhan dengan data personal (nama, nomor, keluhan sensitif). Pedoman AoIR tentang etika riset internet menekankan bahwa etika internet research perlu memperhatikan konteks, ekspektasi

privasi, informed consent, serta mitigasi risiko bagi subjek (Franzke et al, 2020). Walaupun pedoman tersebut dibuat untuk riset, prinsipnya relevan untuk pengelolaan aspirasi partai: jika data warga bocor atau disalahgunakan, kepercayaan turun dan aspirasi berhenti mengalir. Karena itu, demokrasi digital menuntut partai memikirkan tata kelola data aspirasi: siapa yang mengakses, bagaimana disimpan, bagaimana dikelola, dan bagaimana dilaporkan tanpa membuka identitas warga. Untuk memahami faktor pendukung/penghambat, pembelajaran dari platform aspirasi pemerintahan dapat dipakai sebagai cermin. Studi mengenai platform JAKI menggambarkan adanya kebutuhan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam menampung aspirasi, dengan penggunaan platform sebagai wadah pelaporan (Vandito et al, 2023). Pelajaran pentingnya: platform bukan sekadar tempat menerima laporan, melainkan sistem yang menuntut tindak lanjut, status, dan integrasi.

Dalam konteks partai, pembelajaran ini mengarah pada tantangan: partai sering memakai media sosial untuk komunikasi dan kampanye, tetapi belum tentu memiliki sistem “manajemen aspirasi” yang setara dengan workflow pelayanan publik. Akibatnya, kanal digital menjadi “jebakan” ketika ekspektasi publik meningkat, tetapi kapasitas tindak lanjut tidak sebanding. Di sini, faktor pendukung berupa kemampuan organisasi untuk membuat SOP, tim admin, dan jalur eskalasi ke fraksi atau mitra pemerintah menjadi penentu apakah demokrasi digital memperkuat atau melemahkan kinerja penyaluran aspirasi (Khairil et al, 2024).

Pengawasan partisipatif Bawaslu juga memberi pelajaran bahwa partisipasi berbasis teknologi memerlukan pengelolaan media sosial dan transfer pengetahuan, tidak cukup hanya membuat portal (Bawaslu, 2017). Jika institusi sebesar Bawaslu saja menekankan pentingnya pengelolaan media sosial sebagai sarana sosialisasi dan transfer pengetahuan, maka partai politik pun perlu strategi yang sama: edukasi publik tentang kanal aspirasi resmi, prosedur pengajuan aspirasi, dan mekanisme tindak lanjut.

Simpulan

Pertama, kinerja PKB dalam menyalurkan aspirasi rakyat pada era demokrasi digital dapat dipahami sebagai kemampuan partai menghubungkan aspirasi warga dengan tindakan programatik dan jalur kelembagaan. Pada level Dumai, kinerja tersebut tampak dari orientasi program ekonomi yang menargetkan ketersediaan pangan melalui kios pangan kebangsaan dan pemerataan hingga kelurahan. perhatian pada ranah sosial-budaya dalam masyarakat multietnik dengan mengedepankan adat dan lembaga adat serta penekanan pembangunan SDM sebagai fondasi peradaban Pada level literatur, pola ini sejalan dengan fungsi partai sebagai perantara yang menghimpun aspirasi melalui jalur formal (fraksi DPRD) dan informal (pertemuan personal) Kedua, mekanisme penghimpunan, pemrosesan, dan tindak lanjut aspirasi menunjukkan kombinasi kanal non-digital dan digital. Kanal non-digital diwujudkan melalui jejaring sosial lokal (kegiatan budaya, pertemuan) dan koordinasi formal dengan DPRD yang berlangsung rutin minimal sebulan sekaligus kanal digital tampak melalui penggunaan instrumen survei daring yang menghasilkan 19 jawaban an pembacaan literatur bahwa PKB memanfaatkan media sosial (misalnya TikTok) untuk menjangkau publik muda dan membangun engagement. Sementara itu, pemrosesan aspirasi lebih tampak melalui kemampuan partai mengikat aspirasi ekonomi dalam satu program payung pangan, dan menautkan aspirasi budaya pada dukungan terhadap kesenian daerah. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat memperlihatkan dinamika khas demokrasi digital. Faktor pendukungnya adalah struktur representasi DPRD dan ritme koordinasi internal program payung yang jelas, legitimasi sosial lewat pengakuan adat dan keragaman serta peluang kanal digital untuk memperluas partisipasi khususnya pemilih muda. Hambatan utamanya adalah faktor struktural kebodohan dan kemiskinan yang menghambat kualitas partisipasi dan akses kesenjangan literasi digital nasional yang masih “sedang” dan lemahnya keamanan digital

Daftar Pustaka

- Ambarwati, D., & Assiddiq, D. U (2021). Strategi komunikasi politik tim kampanye daerah Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin Provinsi Jawa Timur. *Nomosleca*, 7(1), 50–67.
- Aminulloh, A., Ananda, K. S., Anzari, P. P., Fianto, L., & Qorib, F (2025). Political Gimmicks on Social Media in the 2024 Indonesian Presidential Election. *The Journal of Society and Media*, 9(1), 74–96. <https://doi.org/10.26740/jsm.v9n1.p74-96>
- Ardy Susanto, & Marlinda Irwanti Poernomo (2025). Personal Branding Kader PKB dalam Mendukung Citra PKB Sebagai Partai Terbuka (Inklusif). *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(3), 431–439. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4435>

- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N (2023). Upaya Partai Politik Dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual Di Era Digital. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i1.2281>
- Dewi, N. R., & Sholahuddin, A (2020). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menjawab Tantangan Multikultural di Indonesia: Studi Kasus Papua. *Politea*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.21043/politea.v3i1.7255>
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N (2023). Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 61–72. <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>
- Firdaus, R. K. A., Syamsudin, N., & Masrohatun, M (2021). Pola Komunikasi Politik: Dpc Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Kabupaten Kudus. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 3(2), 187–196. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i2.11762>
- Fitriyah, F., Sweinstani, M. K. D., Noor, F., Romli, L., Hanafi, R. I., & Siregar, S. N (2025). The convergence of contemporary Indonesian political parties. *Frontiers in Political Science*, 7(October). <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1640022>
- Ihsan, K., Khofifah Khairunisa, T., Zulkhoir, I., Nasir Hasibuan, A., & Islam Negeri Sumatera Utara, U (2023). Mimbar Kampius: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 22(2), 529–537. <https://doi.org/10.17467/mk.v22i2.3159>
- Khairil, M., Alatas, R., Fitria, D., & Sari, K (2024). Understanding Political Party Images : Impact on Loyalty and Solidarity among Party Members for the 2024 Election. *Proceedings of the Asian Academic Collaboration Forum (AACF)*, 1(1), 138–145.
- Misbachuddin, A., Setiyanto, A., Alnoza, M. F., Ahmad, M., Maulana, M. E., & Himawanda, Y. S (2025). Inequality of political party representation in the Indonesian legislative system: Critical study and recommendations for reform. *Adhyayana: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 27–36.
- Muhamad Farhan (2018). Strategi Komunikasi Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember Menjelang PEMILUKADA Jawa Timur 201. *Aladalah*, 22(1), 1–12.
- Nofiard, F (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10(2), 31. <https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548>
- Nuwa, D., Servatius, R., & Ola, U (2025). Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 380–400.

- Rahman, F. (2025). Demokrasi Digital dan Ujaran Kebencian: Antara Kebebasan Berekspresi dan Represi Politik Digital Democracy and Hate Speech: Between Freedom of Expression and Political. *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikas*, 6(3), 259–272.
- Ramadhani, S. R. R., Nazaki, N. & Darmawan, E. (2025). Strategi Pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Legislatif di Kota Tanjungpinang Tahun 2024. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(4), 60–73. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i4.1165>
- Rois, A. D (2024). Peran Media Baru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z (Studi: Penggunaan TikTok sebagai Sarana Pemasaran Politik Partai Kebangkitan Bangsa Menuju Pemilu 2024). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 575–588. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2418>
- Suryani, S., & Azmy, A. S (2023). Political Strategy of Women’S Legislative Members of the Republic of Indonesia From National Mandate Party (Pan) and National Awakening Party (Pkb) in the 2019 General Elections. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(1), 42. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i1.38829>
- Tengah, K., & Layanan, K (2020). Kabupaten Barito Selatan The Effect of Employee Performance on Organizational Effectiveness in the Kecamatan Dusun Selatan Office of Selatan Barito District.
- Vandito, R. L., Paramesti, A., Aminudin, M. A. V., & Wulandari, L (2023). Manifestasi Konsep Demokrasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta: Studi Kasus Pemanfaatan Platform “Jakarta Kini (JAKI)” Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–16.
- Vinanda, O. R., Saputra, A. R., Istiqomah, B. A., Ramadhan, L. R., & Asiffa, M (2025). Fungsi Partai Politik dalam Sosialisasi Politik di Era Digital. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(5), 10303–10311.